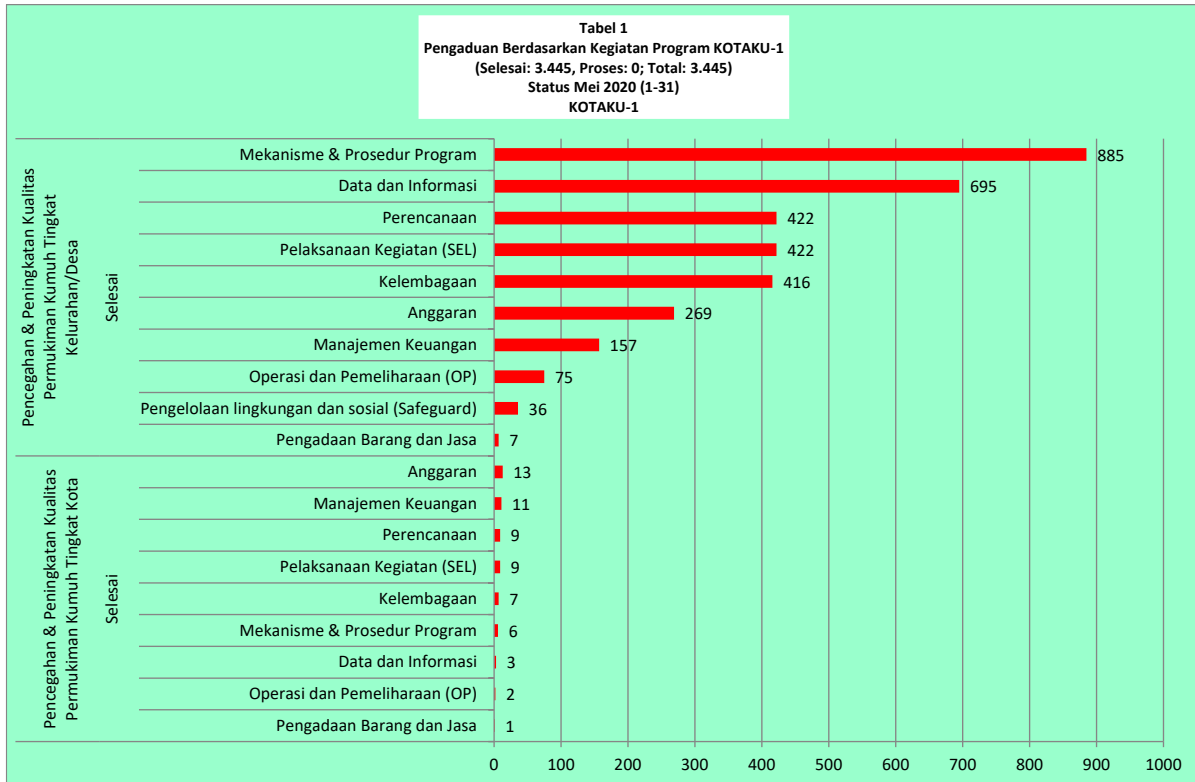


**Progres Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)
Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Mei 2020
KOTAKU-1
(OSP 1, OSP 2, OSP 3, OSP 4, OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9, OSP 10,
OSP 11)**

Dalam mewujudkan amanah UUD 1945 pasal 28 E (3): *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*, dalam tatanan demokrasi dan keterbukaan tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti di bidang pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena kinerja pemerintah salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan layanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1: *Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.*

Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu "***sistem pemantauan dan evaluasi (monev)***". Sistem tersebut antara lain mencakup pengembangan website dan manajemen sistem informasi (SIM), uji petik, pemantauan pemerintah melalui sistem e-monitoring, audit/pemeriksaan inspektorat dan BPKP, pemantauan teknis, serta penanganan pengaduan atau dalam hal ini disebut Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM).

Berdasarkan data SIM PIM bulan Mei 2020, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 berjumlah 3.445 pengaduan (selesai 3.445 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data bulan lalu terjadi kenaikan data sebanyak 836 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 2.609 pengaduan). Kenaikan ini disebabkan antara lain karena seluruh provinsi telah mengirim data SIM berbasis MS Excel dan ada sejumlah Kota/Kabupaten yang mengirimkan datanya terjadi kenaikan.



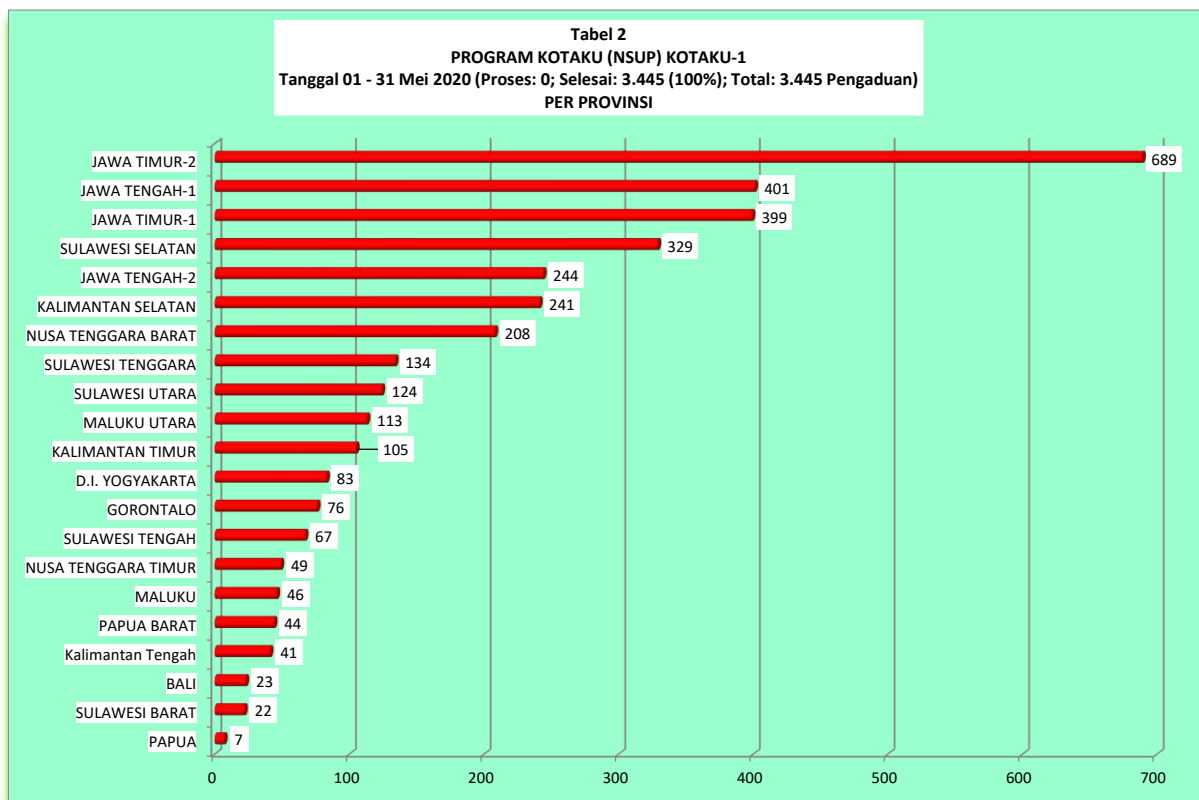
Progres pengaduan di bulan Mei 2020 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kel/desa yang didominasi oleh Provinsi Jawa Timur-2 (689 pengaduan). Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kota didominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan (47 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Tabel 1a		JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1																				
	BALIK	D I YOGYAKARTA	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2	JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1	Grand Total	
≡ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kelurahan/Desa	23	83	76	241	41	104	46	113	202	49	7	41	22	282	67	134	124	689	240	399	401	3384
Selesai	23	83	76	241	41	104	46	113	202	49	7	41	22	282	67	134	124	689	240	399	401	3384
≡ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota						1			6			3		47					4			61
Selesai						1			6			3		47					4			61
Grand Total	23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	67	134	124	689	244	399	401	3445

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa (3.384 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai mekanisme dan prosedur program (885 pengaduan atau 26,2%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (61 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai anggaran (13 pengaduan atau 21,3%).

Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak 3.445 pengaduan (selesai 3.445 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada tabel 2 terlihat bahwa seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 31 Mei 2020.



Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 Periode Mei 2020

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 yang terjadi pada tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2020, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 3.445 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 3.445 (100%) pengaduan dan status proses sejumlah 0 (0%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 3.443 (99,9%) [selesai 3.443 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 2 (0,1%) [selesai 2 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan jenis aduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Aduan (Informasi/Aspirasi & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1 01 Mei 2020 - 31 Mei 2020				
INFORMASI/ASPIRASI				
NO.	JENIS ADUAN	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Permintaan Informasi	2.785	-	2.785
2	Penyampaian Aspirasi	658	-	658
Sub Total		3.443	-	3.443
MASALAH				
NO.	KATEGORI MASALAH	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Pelanggaran administrasi	-	-	-
2	Pelanggaran Kode Etik	-	-	-
3	Ketidaksesuaian/pelanggaran kebijakan, aturan, mekanisme, prosedur	-	-	-
4	Penyimpangan standar & kualitas pekerjaan Infrastruktur	1	-	1
5	Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang	-	-	-
6	Penyalahgunaan Dana	-	-	-
7	Force Majeure	1	-	1
Sub Total		2	-	2
TOTAL		3.445	-	3.445
Persentase		100,00%	0,00%	

Sumber: Data SIM PIM 31 Mei 2020

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei – 31 Mei 2020 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah 1/OSP 1 (1.201 Kelurahan) memperoleh 33% dan Provinsi dengan jumlah Kelurahan/Desa sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 129%. (Lihat tabel 4)

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 periode 01 – 31 Mei 2020 sebesar 33%.

Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 50% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah 1/OSP-1 (33%), Jawa Tengah 2/OSP-2 (31%), DI Yogyakarta (47%), Jawa Timur 1/OSP-3 (36%), Bali (18%), Nusa Tenggara Timur (38%), Sulawesi Utara (40%), dan Papua (18%).

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Mei 2020 Program KOTAKU -1

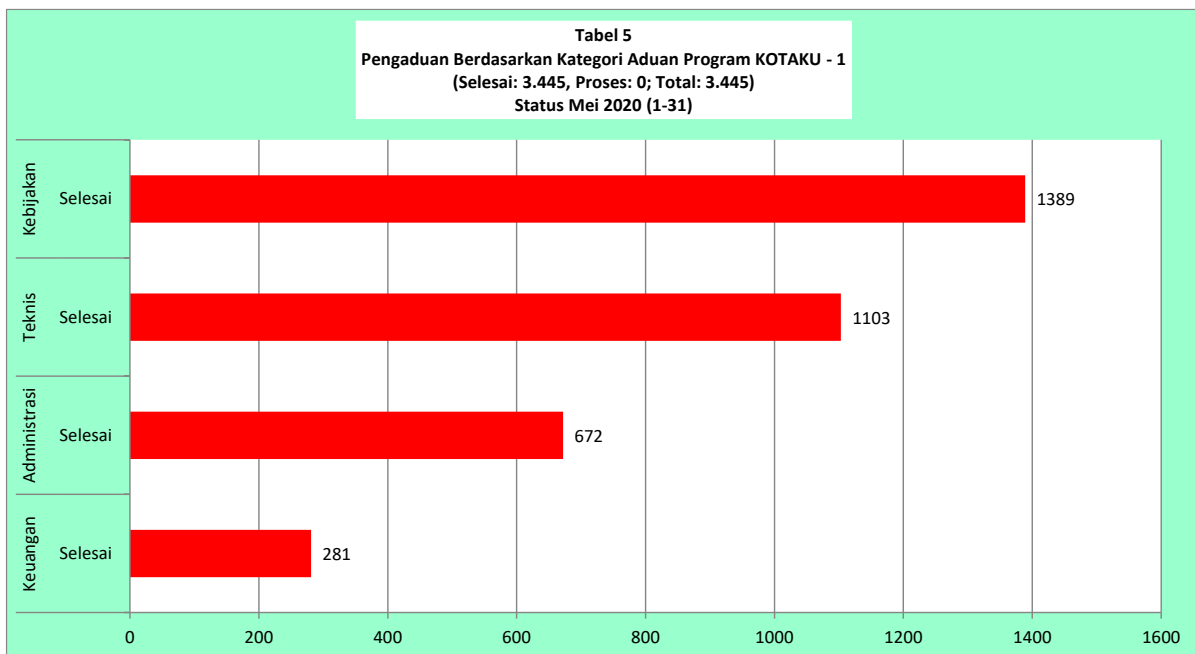
Provinsi	Jml Kel	BPM 2020 (Kel)	BPM 2019 (Kel)	BDI 2018 (Kel)	Tim Korkot + Faskel (org)	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah 1 (OSP 1)	1.201	8	129	126	337	401	33	401	100	-	-
Jawa Tengah 2 (OSP 2)	782	6	95	73	218	244	31	244	100	-	-
DI Yogyakarta	178		16	42	50	83	47	83	100	-	-
Jawa Timur 1 (OSP 3)	1.098	27	51	96	212	399	36	399	100	-	-
Jawa Timur 2 (OSP 4)	759	3	65	90	215	689	91	689	100	-	-
Bali	130				36	23	18	23	100	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	34	6	50	60	208	95	208	100	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	2	7	28	73	49	38	49	100	-	-
Kalimantan Tengah	41		7	4	22	41	100	41	100	-	-
Kalimantan Selatan	239	5	38	69	142	241	101	241	100	-	-
Kalimantan Timur	145	5	3	40	59	105	72	105	100	-	-
Sulawesi Utara	307	5	8	31	67	124	40	124	100	-	-
Sulawesi Tengah	58	45	3	19	43	67	116	67	100	-	-
Sulawesi Selatan	321	18	59	130	175	329	102	329	100	-	-
Sulawesi Tenggara	129	10	27	56	72	134	104	134	100	-	-
Gorontalo	73	10	9	15	28	76	104	76	100	-	-
Sulawesi Barat	17	3	4	2	23	22	129	22	100	-	-
Maluku	84		4	22	37	46	55	46	100	-	-
Maluku Utara	152		18	28	39	113	74	113	100	-	-
Papua Barat	41	4	16	10	30	44	107	44	100	-	-
Papua	39	5	5	9	18	7	18	7	100	-	-
Total	6.143	190	570	940	1.956	3445	33	3.445	100,0	-	-

Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Mei 2020 jumlah pengaduan yang masuk ada 3.445 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 100%.

2. Pengaduan Berdasarkan Kategori Aduan (d/h Bidang Pengaduan)

Berdasarkan kategori aduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) kebijakan, (2) administrasi, (3) keuangan, dan (4) teknis. Adapun yang dimaksud kebijakan adalah mencakup seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan (Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Konsultan) yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah yang menjadi

kewenangannya. Sedangkan administrasi yaitu mencakup kegiatan penyusunan, pengisian dan pendokumentasian administrasi yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk keuangan adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengalokasian, pencairan, pemanfaatan dan pengendalian keuangan sesuai ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Adapun mengenai teknis adalah mencakup mekanisme dan prosedur pelaksanaan dan output kegiatan baik kegiatan infrastruktur, Sosial dan ekonomi serta pengelolaan SDM sesuai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.



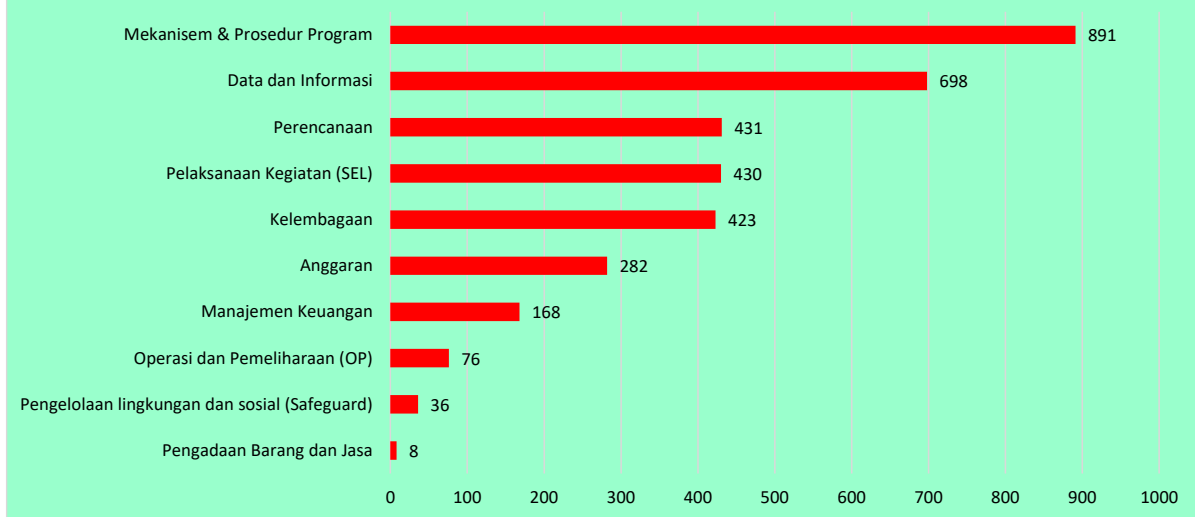
Pada tabel 5 dalam kategori aduan kebijakan sebanyak 1.389 pengaduan (selesai 1.389 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); kategori aduan teknis sebanyak 1.103 pengaduan (selesai 1.103 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); kategori aduan administrasi sebanyak 672 pengaduan (selesai 672 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan kategori aduan keuangan sebanyak 281 pengaduan (selesai 281 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

KATEGORI ADUAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	B A L I	D · I · Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K a l i m a n t a n T e n g a h	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	J A W A T I M U R - 2	J A W A T E N G A H - 2	J A W A T I M U R - 1	J A W A T E N G A H - 1	G r a n d T o t a l		
																						22	32
Administrasi		22	32	97	27	3	19	8	23			1	6	4	35	20	18	74	181	102	672		
Selesai		22	32	97	27	3	19	8	23			1	6	4	35	20	18	74	181	102	672		
Kebijakan		23	54	14	121	4	73	27	86	86	47	2	32	15	237	23	81	79	9	150	31	195	1389
Selesai		23	54	14	121	4	73	27	86	86	47	2	32	15	237	23	81	79	9	150	31	195	1389
Keuangan			2	15	6	2	6		9	11			1	1	16	8	8	2	20	20	110	44	281
Selesai			2	15	6	2	6		9	11			1	1	16	8	8	2	20	20	110	44	281
Teknis			5	15	17	8	23		10	88	2	5	10		72	36	10	23	642		77	60	1103
Selesai			5	15	17	8	23		10	88	2	5	10		72	36	10	23	642		77	60	1103
Grand Total		23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	67	134	124	689	244	399	401	3445

3. Pengaduan berdasarkan Jenis Aduan

Berdasarkan jenis aduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada tiga (3), yaitu Permintaan Informasi, Penyampaian Aspirasi, dan Masalah. Yang dimaksud dengan permintaan informasi adalah pertanyaan dan/atau permintaan data atau hal sejenisnya yang membutuhkan jawaban atau klarifikasi dari pelaku atau pengelola program. Dan penyampaian aspirasi adalah kritik, penilaian, tanggapan, masukan atau hal sejenisnya yang disampaikan oleh semua pihak dengan tujuan dan harapan untuk perbaikan atau penyempurnaan program. Jadi jenis aduan permintaan informasi dan penyampaian aspirasi tersebut **harus** diinput kedalam aplikasi PIM berbasis web. Demikian juga dengan jenis aduan masalah adalah laporan, keluhan, atau ketidakpuasan yang diterima maupun ditemukan secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penyelenggaraan program sehingga berpotensi menghambat keberhasilan program.

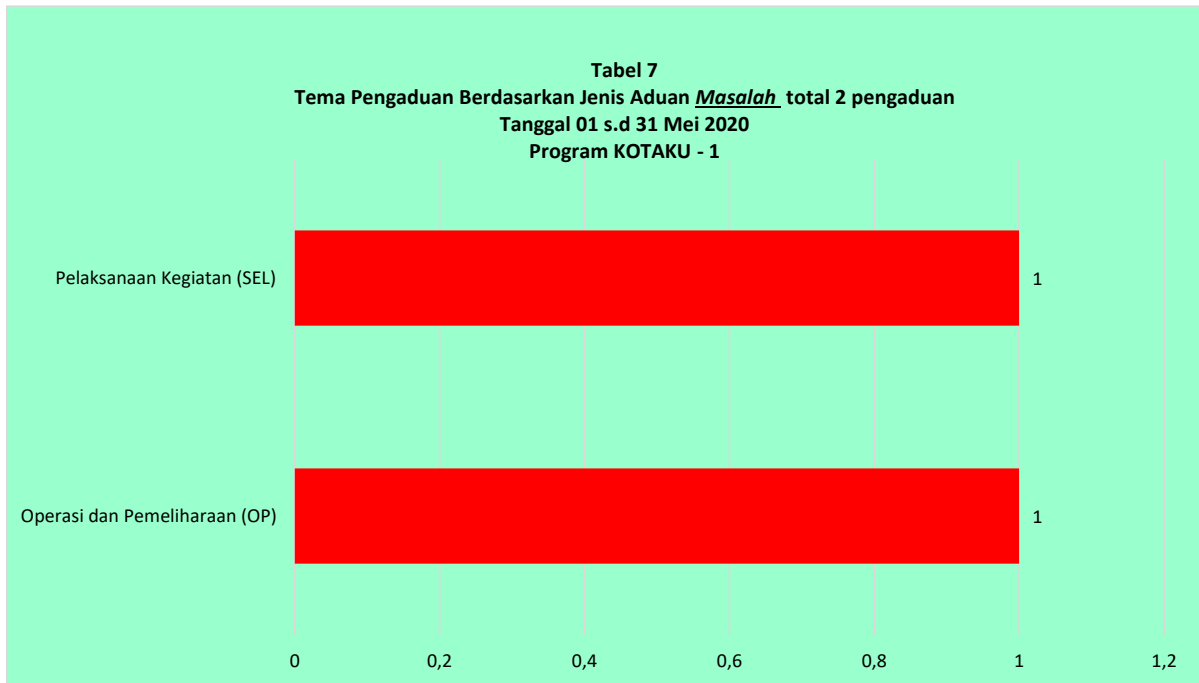
Tabel 6
Tema Pengaduan Berdasarkan Jenis Aduan Permintaan Informasi dan Penyampaian Aspirasi
total 3.443 pengaduan
Tanggal 01 s.d 31 Mei 2020
Program KOTAKU - 1



Berdasarkan data pada bulan Mei 2020 untuk jenis aduan permintaan informasi dan penyampaian aspirasi sebanyak 3.443 pengaduan (selesai 3.443 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

Tema Pengaduan	BALI	DIY	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSATENGGARA BARAT	NUSATENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2	JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1	Grand Total	
																						Selesai
Mekanisem & Prosedur Program	19	35	28	3	67	19		64	43	2	1	3		23	6	48	416	42	14	58	891	
Selesai	19	35	28	3	67	19		64	43	2	1	3		23	6	48	416	42	14	58	891	
Data dan Informasi	51	6	147	15		12	40	46			17	8	1		6	25		156	167	1	698	
Selesai	51	6	147	15		12	40	46			17	8	1		6	25		156	167	1	698	
Perencanaan	10		1	18	3	1	4	4	4			2	2	125	7	69	9		8	22	142	431
Selesai	10		1	18	3	1	4	4	4			2	2	125	7	69	9		8	22	142	431
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)		1	5	15		20	2		48		4	14		32	13	1	10	237	1	15	12	430
Selesai		1	5	15		20	2		48		4	14		32	13	1	10	237	1	15	12	430
Kelembagaan	13	8	23	18	13	14	8	24	2	4		5	6	57	10	28	9	22	22	33	104	423
Selesai	13	8	23	18	13	14	8	24	2	4		5	6	57	10	28	9	22	22	33	104	423
Anggaran		1	1	11			1	31	10			2	3	73	4	15	13		12	90	15	282
Selesai		1	1	11			1	31	10			2	3	73	4	15	13		12	90	15	282
Manajemen Keuangan		2		2	3	1		1	16			1		18	3	1	9	2	3	50	56	168
Selesai		2		2	3	1		1	16			1		18	3	1	9	2	3	50	56	168
Operasi dan Pemeliharaan (OP)		1	3		2	1		6	10	2		2		15	1	3		12		7	11	76
Selesai		1	3		2	1		6	10	2		2		15	1	3		12		7	11	76
Pengelolaan lingkungan dan sosial (Safeguard)			2	1	2	1		7	4		1			7	5	4				1	1	36
Selesai			2	1	2	1		7	4		1			7	5	4				1	1	36
Pengadaan Barang dan Jasa				1					4					1		1	1					8
Selesai				1					4					1		1	1					8
Grand Total	23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	66	134	124	689	244	399	400	3443

Pada jenis aduan masalah pada bulan Mei 2020 pengaduan sebanyak 2 pengaduan (selesai 2 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



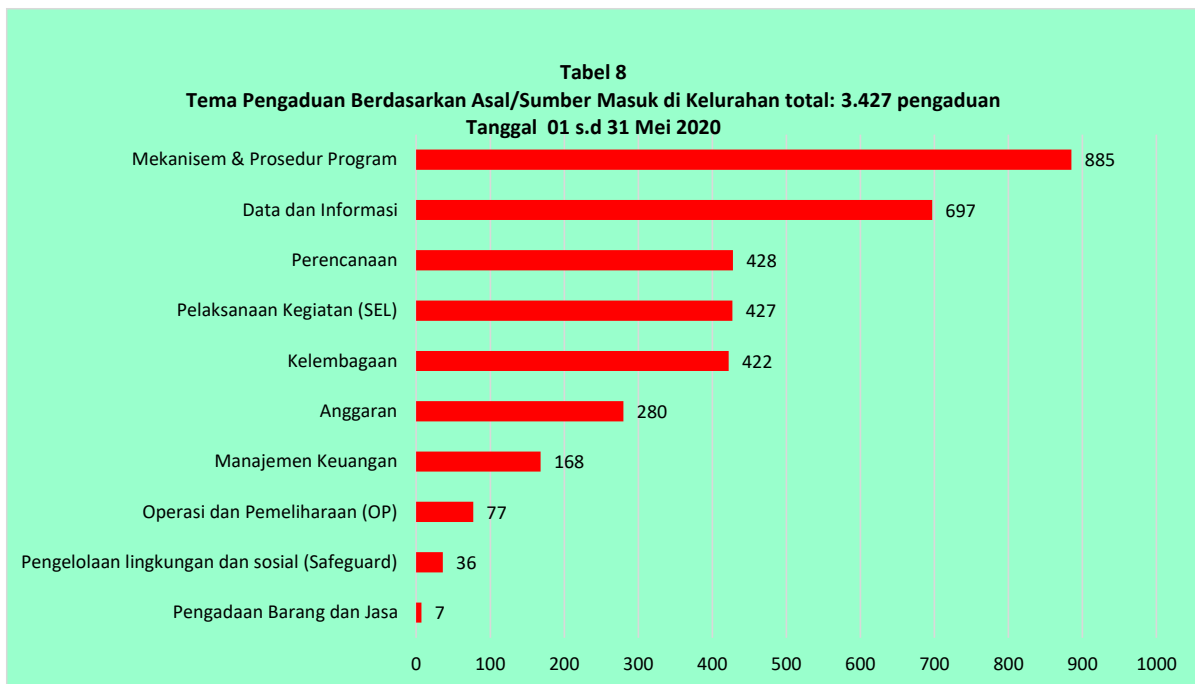
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

Tabel 7a	S U L A W E S I T E N G A H	J A W A T E N G A H 1	G r a n d T o t a l
MASALAH/TEMA ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1			
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Kegiatan (SEL)	1		1
Selesai	1		1
<input type="checkbox"/> Operasi dan Pemeliharaan (OP)		1	1
Selesai		1	1
Grand Total	1	1	2

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Mei 2020 sebanyak 3.427 pengaduan.

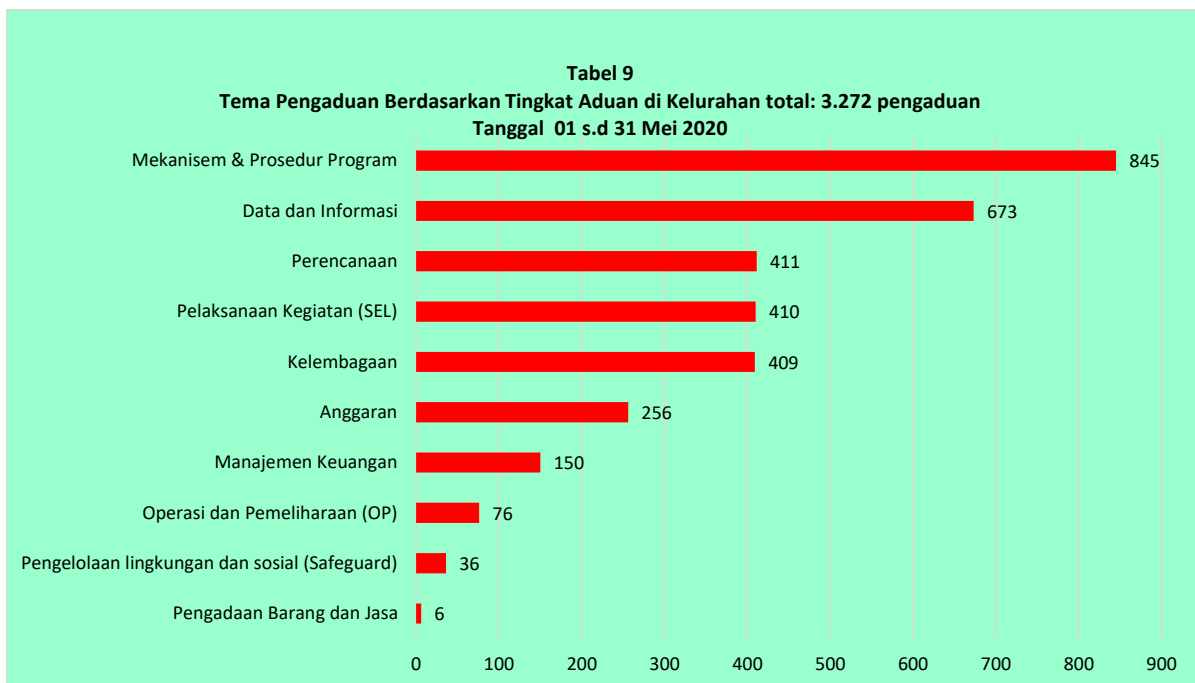


Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

Tema	S U M B E R A D U A N / T E M A																	Grand Total				
	BAL	DIA	GORONTALO	KALIMANTAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN	MALUKU	MALUKU	MALUKU	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI UTARA		JAWA TIMUR-1	JAWA TIMUR-2	JAWA TENGAH-1	JAWA TENGAH-2
Mekanisme & Prosedur Program	19	34	28	3	65	19	64	43	2	1	3	23	6	48	416	42	14	55	885			
Data dan Informasi	50	6	147	15	12	40	46	17	8	1	6	25	156	167	1	697						
Perencanaan	10	1	18	3	1	4	4	4	2	2	122	7	69	9	8	22	142	428				
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)	1	5	15	20	2	47	4	14	32	11	1	10	237	1	15	12	427					
Kelembagaan	13	8	23	18	13	14	8	24	2	4	5	6	57	10	28	8	22	22	33	104	422	
Anggaran	1	1	11	1	31	10	2	3	71	4	15	13	12	90	15	280						
Manajemen Keuangan	2	2	3	1	1	16	1	18	3	1	9	2	3	50	56	168						
Operasi dan Pemeliharaan (OP)	1	3	2	1	6	10	2	2	15	1	3	12	7	12	77							
Pengelolaan lingkungan dan sosial (Safeguard)	2	1	2	1	7	4	1	7	5	4	1	1	36									
Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	4	7	7	1	1	7	7	7	7	7	7	7						
Grand Total	23	82	75	241	41	103	46	113	207	49	7	44	22	323	64	134	123	689	244	399	398	3427

5. Pengaduan berdasarkan Tingkat Aduan

Tingkat aduan menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan aduan, yaitu: tingkat Kelurahan/Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat KMW/Propinsi, dan Tingkat Nasional.

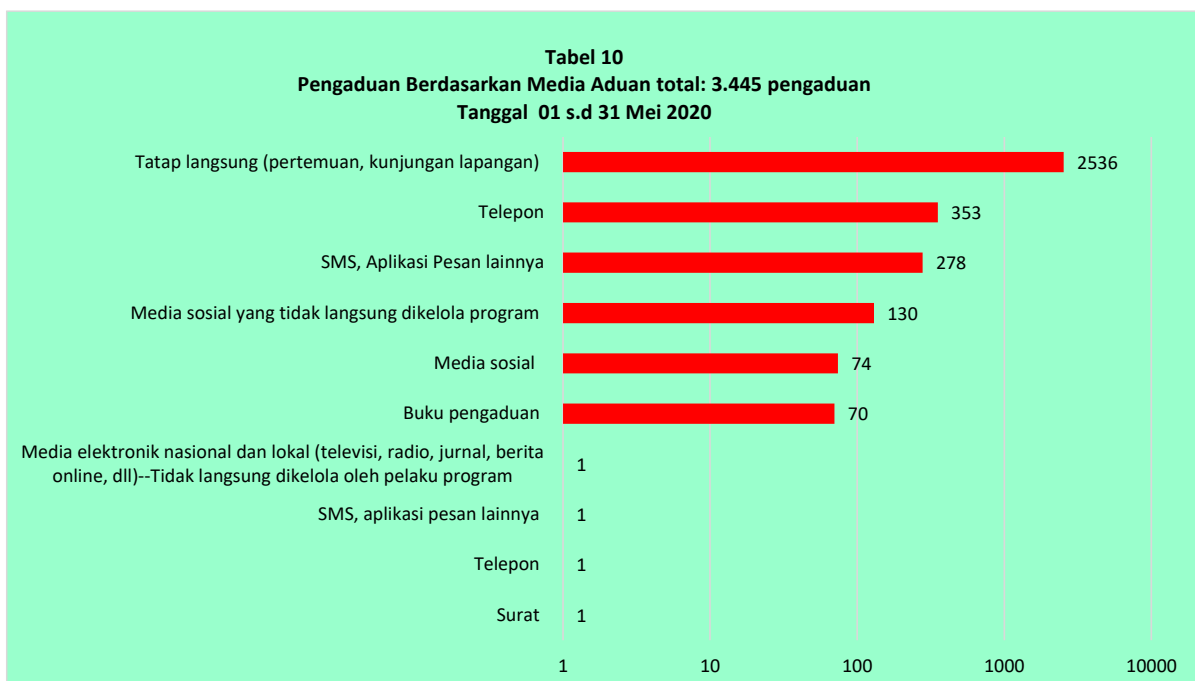


Pada bulan Mei 2020 penanganan pengaduan berdasarkan tingkat aduan di Kelurahan total 3.272 pengaduan. Tabel 9a berdasarkan per provinsi.

TINGKAT ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	B A L I	D . I . G O R O N T A L O Y O G Y A K A R T A	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K a l i m a n t a n T e n g a h	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L L U K U	M A L L U K U U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	J A W A T I M U R - 2	J A W A T E N G A H - 2	J A W A T I M U R - 1	J A W A T E N G A H - 1	G r a n d T o t a l		
																						19	35
Mekanisme & Prosedur Program		19	35	28	3	65	19	28	42	2	1	3	17	6	48	415	42	14	58	845			
Data dan Informasi		50	6	147	15	12	40	22			17	8	1		6	25		156	167	1	673		
Perencanaan		10	1	18	3	1	4	1		2	2	109	6	69	9			8	22	142	411		
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)		1	5	15		20	2	37		4	13	24	13	1	10	237		1	15	12	410		
Kelembagaan		13	8	23	18	13	14	8	24	1	1	5	6	49	9	28	8	22	22	33	104	409	
Anggaran		1	1	10			1	31	4		2	3	54	4	15	13		12	90	15	256		
Manajemen Keuangan		2		2	3	1		1	9			1	7	3	1	9	2	3	50	56	150		
Operasi dan Pemeliharaan (OP)		1	3		2	1		6	10	2		2	14	1	3		12		7	12	76		
Pengelolaan lingkungan dan sosial (Safeguard)			2	1	2	1		7	4		1		7	5	4				1	1	36		
Pengadaan Barang dan Jasa				1				2					1		1	1					6		
Grand Total		23	82	76	240	41	103	46	113	118	45	7	43	22	266	58	134	123	688	244	399	401	3272

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas:



Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil,

Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

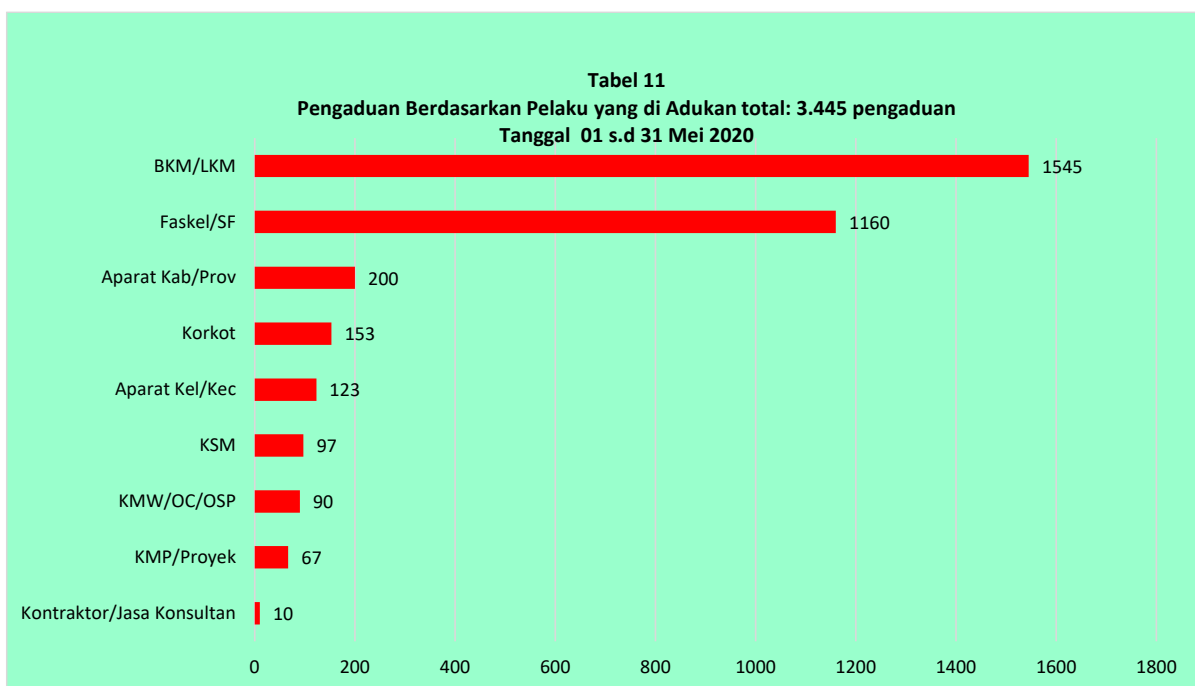
Berdasarkan data pada bulan Mei 2020 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebanyak 2.536 pengaduan (73,6%) dari total 3.445 pengaduan. Tabel 10a berdasarkan per provinsi.

Tabel 10A		MEDIA ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1																	Grand Total					
		BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N	K a l i m a n t a n	K A L I M A N T A N	M A L U K U	M A L U K U	N U S A	N U S A	P A P U A	P A P U A	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	J A W A	J A W A	J A W A	J A W A			
					S E L A T A N	T e n g a h	T I M U R	U T A R A	B A R A T	B A R A T	T I M U R	B A R A T	B A R A T	S E L A T A N	T E N G G A H	T E N G G A R A	T E N G G A R A	T I M U R - 2	T I M U R - 1	T I M U R - 1	T E N G G A H - 1			
Surat																						1	1	
Telepon																		1						1
SMS, aplikasi pesan lainnya																		1						1
Media elektronik nasional dan lokal (televisi, radio, jurnal, berita online, dll)--Tidak langsung dikelola oleh pelaku program															1									1
Buku pengaduan					4										1			22	1		33	9	70	
Media sosial		9		2	2		4								6								51	74
Media sosial yang tidak langsung dikelola program									2					2								112	14	130
SMS, Aplikasi Pesan lainnya									10					20	3	9	1	40	71	33	91		278	
Telepon			1	1	4		33		74	14		1	5		78	2	27		10	41	12	50	353	
Tatap langsung (pertemuan, kunjungan lapangan)		14	82	73	231	41	68	46	39	182	49	6	39	22	229	54	96	101	638	132	209	185	2536	
Grand Total		23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	67	134	124	689	244	399	401	3445	

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Mei 2020 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah BKM/LKM dengan jumlah 1.545 pengaduan (44,8%) dari total 3.445 pengaduan.



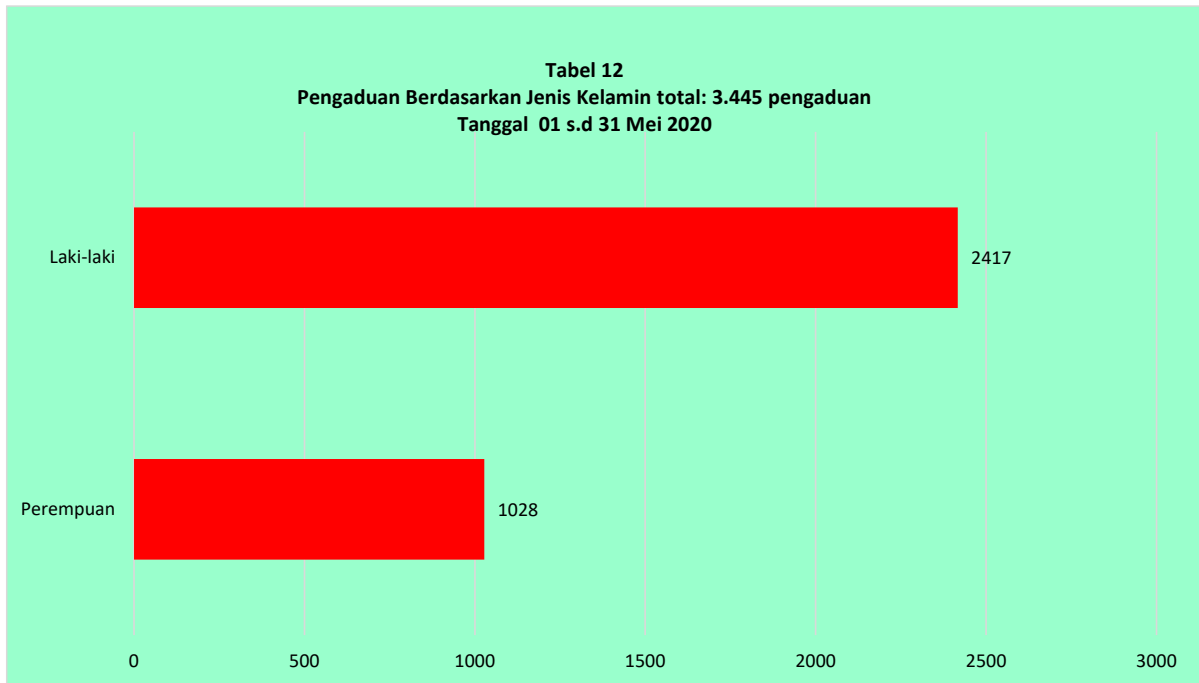
Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

PELAKU YANG DIADUKAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1	BAL I	D · I · Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K a l i m a n t a n T e n g a h	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U U T A R A	N U S A	N U S A	N U S A	P A P U A	P A P U A	P A P U A	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	J A W A	J A W A	J A W A	J A W A	J A W A	G r a n d	T o t a l	
	Kontraktor/Jasa Konsultan						1						1			1										7	10
KMP/Proyek				2	4				23			1			3			12			7				15	67	
KMW/OC/OSP	2			1					50	1				16	1	3	7				7				2	90	
KSM			13			1			2	2	1				21	1		13	30						13	97	
Aparat Kel/Kec	3					2			8	8					38	5	5	29						13	12	123	
Korkot			1			3	13								8	3	3	3							49	38	153
Aparat Kab/Prov					2	2			14	4		3	3	81	4	3	5	27	1						51	200	
Faskel/SF	9	63	4	191	8	57	45	113	61	13	3	28	7	23	3	63	87				108	117	157		1160		
BKM/LKM	9	19	59	46	23	31	1		19	20	3	11	12	160	29	56	10	620	42	269	106				1545		
Grand Total	23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	67	134	124	689	244	399	401				3445		

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui. Berdasarkan data pada bulan Mei 2020

pengaduan berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-laki dengan jumlah 2.417 pengaduan (70,2%) dan Perempuan sebanyak 1.028 pengaduan (29,8%), serta tidak diketahui sebanyak 0 pengaduan (0%) dari total 3.445 pengaduan.

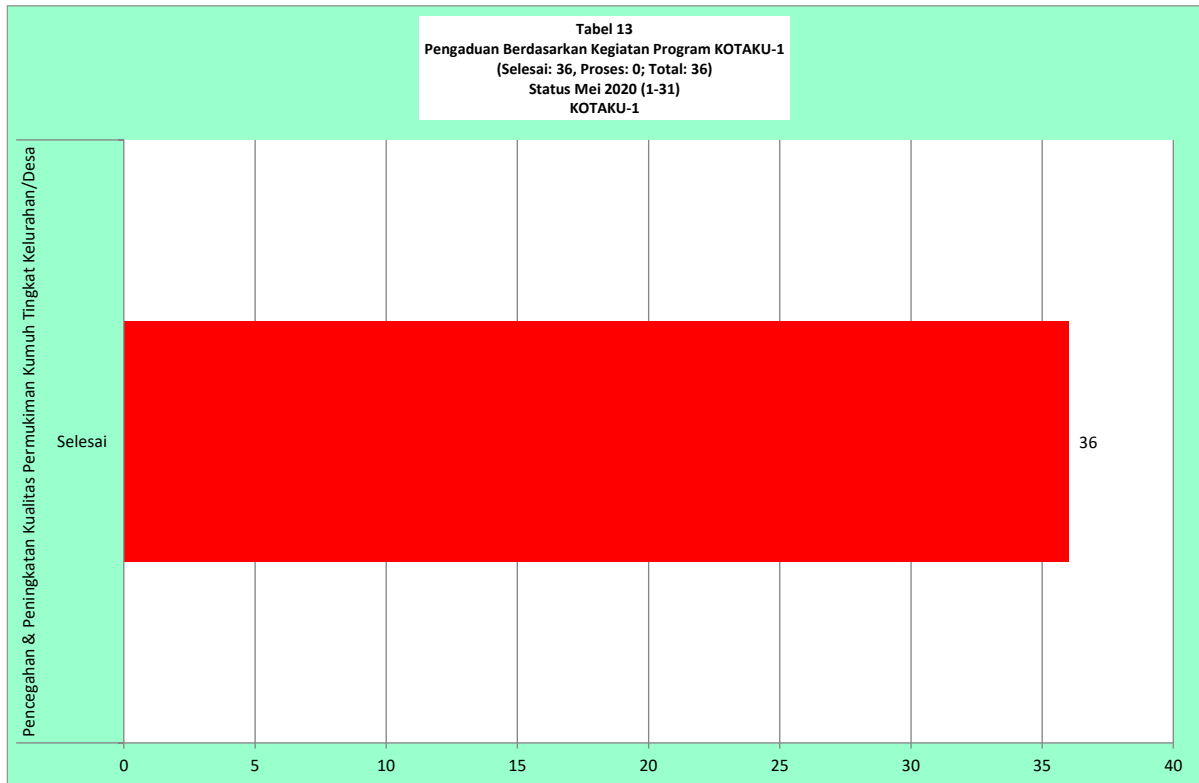


Tabel 12a berdasarkan per provinsi.

Jenis Kelamin	Provinsi																Grand Total					
	BALI	D.I. YOGYAKARTA	GORONTALO	KALIMANTAN SELATAN	Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGGARA		SULAWESI UTARA	JAWA TIMUR - 2	JAWA TENGAH - 2	JAWA TIMUR - 1	JAWA TENGAH - 1
Laki-laki	19	70	38	166	23	69	32	87	184	44	5	28	14	220	51	96	77	438	151	295	310	2417
Perempuan	4	13	38	75	18	36	14	26	24	5	2	16	8	109	16	38	47	251	93	104	91	1028
Grand Total	23	83	76	241	41	105	46	113	208	49	7	44	22	329	67	134	124	689	244	399	401	3445

SEKILAS DATA PENGADUAN MENGENAI KATEGORI TEMA ADUAN SAFEGUARD

Hasil data SIM PIM manual bulan Mei 2020 yang berkaitan dengan *safeguard* berjumlah 36 pengaduan.



Selengkapnya dapat dilihat di tabel 13a.

Tabel 13A

JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) KOTAKU-1

	GORONTALO	KALIMANTAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN	MALUKU	NUSA TENGGARA	PAPUA	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	JAWA	JAWA	Grand Total
	SELATAN	Tengah	TIMUR	UTARA	BARAT		SELATAN	TENGGAH	TENGGAH	TIMUR - 1		- 1	
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kelurahan/Desa	2	1	2	1	7	4	1	7	5	4	1	1	36

Dalam laporan bulan Mei 2020 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) KOTAKU-1 berjumlah 3.445 pengaduan (selesai 3.445 (100%), proses 0 (0%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data bulan lalu terjadi kenaikan data sebanyak 836 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 2.609 pengaduan)

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa 3.384 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai mekanisme dan prosedur program (885 pengaduan atau 26,2%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (61 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai anggaran (13 pengaduan atau 21,3%), sedangkan pengaduan mengenai *safeguard* ada 36 pengaduan yang berkaitan dengan lahan.

Pada laporan PIM ini seluruh Provinsi telah melakukan penginputan data aduan pada SIM PIM berbasis MS Excel. Adapun masih ada kendala pada aplikasi SIM PIM berbasis website.

--- 000 ---

LAMPIRAN

ISI PENGADUAN TEMA ADUAN: SAFEGUARD
000172040520
Adanya beberapa Lokasi BPM tahun 2019 yang terdampak banjir
Bersama KSM dan Pemerintah Kelurahan melakukan peninjauan lokasi terdampak banjir dan memastikan tidak adanya dampak kerusakan atas terjadinya banjir tersebut.
000173080520
Beberapa warga di lingkungan Mannaungi meminta perbaikan tanggul/pondasi sungai sehingga meluapnya air sungai bisa dicegah
Untuk Perbaikan Tanggul Sungai yang ada di Lingkungan Mannaungi tidak termasuk dalam Program KOTAKU dalam 7 indikator kekumuhan, tetapi tetap menjadi rencana kegiatan dalam RPLP Kelurahan sehingga tetap dikordinasikan dengan Pemda baik di Dinas PUPR maupun DLHD untuk penanganan dampaknya
000173120520
Warga dilokasi kegiatan pembangunan Jalan enggang memberikan lahannya untuk pelebaran jalan
Pimpinan Kolektif LKM beserta Pemerintah setempat akan memfasilitasi pertemuan pada tanggal 2 Juni 2020
000174020520
Mengapa Pengelolaan Lingkungan Sosial dalam pelaksanaan program KOTAKU harus dilakukan, sedangkan yang melaksanakan kegiatan adalah masyarakat itu sendiri (05)
Pengelolaan Lingkungan Sosial dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan sangat penting dalam rangka menanggulangi, meminimiliasi dan mengendalikan dampak negatif yang mungkin terjadi pada saat dan setelah pelaksanaan pekerjaan
000175710520
BISAKAH SAKSI YANG BERTANDA TANGAN PADA SURAT IZIN LAHAN HANYA 1 ORANG (12)
SAKSI YANG MENANDATANGANI SURAT IZIN LAHAN MINIMAL 2 ORANG DAN HARUS DI KETAHUI OLEH PIHAK PEMERINTAH KELURAHAN
000235780520
Terkait penggunaan lahan, jangan sampai ada masalah
Penggunaan lahan harus clear dari awal perencanaan agar pada saat kegiatan dilaksanakan tidak lagi ada sengketa soal lahan, semua ijin harus disiap sejak awal yaitu; ijin dilalui, ijin pakai atau hibah harus sudah clear dari awal .
000272040520
Adanya beberapa Lokasi BPM tahun 2019 yang terdampak banjir
Bersama KSM dan Pemerintah Kelurahan melakukan peninjauan lokasi terdampak banjir dan memastikan tidak adanya dampak kerusakan atas terjadinya banjir tersebut.
000273020520
Untuk perbaikan jalan depan rumah saya pak, harus di bongkar dulu karena kalau ditambah lagi tingginya air hujan akan masuk di rumah
Fasilitator dan BKM memberi penjelasan bahwa Untuk pembangunan jalan paving blok jalan paus 4 ada pembongkaran dulu pak sebelum di kerja
000274020520

Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan dilapangan yang menggunakan lahan/tanah warga maka surat-surat apa yang harus digunakan agar kegiatan dapat berjalan lancar (05)
Dalam Program Kotaku ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan dalam penggunaan lahan/tanah warga yaitu : 1. Surat Hibah Lahan dengan pemisahan sertifikat 2. Surat Izin Pakai Lahan minimal 15 Tahun, 3. Surat izin dilalui. Untuk Kelurahan Watonea sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan menggunakan Surat Izin Pakai Lahan untuk kegiatan sumur bor, RTH, dan Izin dilalui untuk kegiatan Drainase dan Jalan Lingkungan.
000594710520
Warga menghimbau agar material pekerjaan tidak mengganggu aktifitas warga di sekitar lokasi pekerjaan
Sudah di sampaikan kepada KSM agar memperhatikan dampak sosia dari kegiatan infrastruktur tersebut dan KSM akan menindaklanjuti dan memperhatikan hal tersebut pada saat kegiatan berlangsung
000673060520
Air di RW 002 RT 002 itu kuning berbau besi dan tidak layak minum
segera berkoordinasi dengan Lurah dan Tim KoTAKU agar kiranya menjadi pertimbangan untuk usulan selanjutnya jika ada anggaran warga di RT002 RW 002 untuk lebih diprioritaskan dalam kegiatan penyediaan air minum
000863040520
Setelah WC Biofilter terbangun, pemeliharaan selanjutnya untuk WC biofil itu seperti apa? (001/6304/0402/V/2020)
Setelah wc biofilter terbangun pemeliharaan harus di lakukan secara berkala dilakukan oleh KPP minimal 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan fisik dan pemberian obat biofil sekitar 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan
000874040520
Permasalahan sampah yang tidak selesai-selesai, sehingga menyebabkan banjir pda musim hujan. Padahal dari program KOTAKU sudah membangun saluran drainase, namun karena banyaknya sampah di tempat sampah yang tidak diangkut petugas kebersihan sehingga pada musim hujan sampah tersebut dibawa arus air sehingga membuat drainase tersumbat (005)
BKM melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait sistem pengangkutan sampah dari tempat sampah pribadi ke TPA. Hasil dari koordinasi tersebut adalah sampah yang ada di Bak Sampah akan diangkut oleh Mobil Petugas Kebersihan Kab. Kolaka untuk dibuang ke TPA.
000874710520
Pekerjaan Jalan Yang di Lakukan BKM Dan KSM Mengalami Kerusakan (05)
Kerusakan Jalan Yg Dilaksanakan Oleh BKM Dan KSM Diakibatkan AdaNya Kendaraan Proyek SKALA KAWASAN Yang Melintasi Jalan tersebut., BKM dan Pemerintah Kelurahan telah berkoordinasi dengan Pihak Kontraktor yang menangani skala kawasan, Hasilnya adalah Pihak Kontraktor Akan Bertanggung Jawab Untuk Memperbaikinya Kembali Setelah Kegiatan Proyek Mereka Sudah 100%.
001073060520
Keluhan dari pihak Sekolah Dasar di Mangasa terkait halaman sekolah terendam air disaat hujan dikarenakan lebih rendah dari pedestrian
BKM bersama warga sekitar dan pihak sekolah telah memperbaiki kualitas pekerjaan dan membuat saluran pembuangan di lokasi tersebut sehingga tidak terjadi lagi genangan

001173060520
Masih banyak sampah yang tidak terangkut dan berserakan dimana-mana
Melakukan koordinasi dengan lurah agar segera mengarahkan motor sampah dan penanggung jawabnya serta berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan kab. Gowa agar pengangkutan sampah semakin diperhatikan khususnya wilayah yang warga keluhkan
001182720520
[Masyarakat belum begitu sadar akan dampak dari sampah. Sampah masih dibuang sembarangan yang dapat mengotori lingkungan permukiman warga (001182720520)];
Cara terbaik mengatasi problema sampah lingkungan adalah memotivasi Pemerintah Desa dan Tim Kesehatan Terpadu melakukan penyuluhan dampak sampah. Membangkitkan inovasi dan semangat warga desa melalui lomba kebersihan lingkungan yang digagas LKM, Lembaga Kepemudaan dan pemerhati lingkungan.
001264030520
bisakah program kotaku memberikan ganti rugi untuk rumah yang terdampak, karna ada rumah yang harus di potong untuk pembangunan BPM 2020 ini (002/PIM/LKM-LIM/V/2020)
Ganti rugi dari program kotaku dapat dilakukan dengan metode perbaikan kembali bagian rumah yang terpotong ke posisi awal, tapi tidak bisa dengan ganti rugi uang tunai
001462710520
Bila tidak ada sistem persampahan yang baik di lingkungan, bagaimana pengelolaan sampah sendiri yang baik? (1/PIM-Panarung/5/2020)
Bisa lakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, untuk sampah organik dapat dilakukan penimbunan / pengomposan di lahan yang ada, untuk non organik tetap harus dilakukan pengolahan sampah sesuai standard, mengacu pada SNI 3242 Tahun 2008.
001573110520
Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong
bertemu langsung dengan pengadu dan memberikan pemahaman tentang mekanisme pencairan dana bergulir
001582720520
[Terjadinya genangan air akibat drainase kurang berfungsi dan masyarakat ingin sentuhan dari program kotaku. (002782710120)];
Tidak ada anggaran dari Kotaku tahun 2020 ini untuk menyelesaikan permasalahan genangan di Kelurahan Payahe sebagai akibat ketidakberfungsian drainase. LKM dan Lembaga Forum Kolaborasi bisa mengkomunikasikan permasalahan genangan dengan Pemerintah Kelurahan untuk mengambil langkah penanganan.
001682710520
[Permasalahan sampah belum teratasi dengan baik. (001682710520)];
Terkait permasalahan sampah, LKM sudah banyak memberikan pemahaman kepada warga kelurahan mengenai pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan masing-masing.
001752710520
Untuk mencegah dan menanggulangi penularan Covid-19, maka untuk koordinasi dengan BKM kita lakukan di kantor Lurah saja. (1)
Fasilitator menyampaikan kepada penanya bahwa kegiatan koordinasi bisa dilakukan dimana saja baik di rumah atau pun di kantor tergantung kondisinya yang penting bahwa di saat wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kita senantiasa mengikuti Protokol Gugus Tugas covid-19

001972710520
Keberatan terkait lokasi penempatan sumur bor, masyarakat khawatir dengan kondisi lingkungan, apakah proses pekerjaan telah sesuai dengan analisis dampak lingkungan
Bersama BKM, fasilitator teknik menyampaikan bahwa pekerjaan sumur bor tersebut sudah mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan yang dilakukan. Jadi bukan AMDAL.
001982710520
[Sering terjadinya kehilangan lampu jalan yang dibangun Program Kotaku. (001982710520)];
Disampaikan, bahwa tidak ada lagi kehilangan lampu jalan karena LKM dan KPP serta warga sekitar yang turut menikmati penerangan lampu jalan terus meningkatkan pengawasan secara kontinyu.
002252710520
BKM menanyakan kepada fasilitator dari mana sumber pembiayaan KPP untuk melakukan pemeliharaan (1)
Fasilitator memberikan penjelasan kepada penanya bahwa KPP diberikan kebebasan untuk mencari dana seperti dari iuran anggota secara sukarela, meminta bantuan pembiayaan kepada Lurah atau mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti CSR atau bantuan pihak ketiga dan lain-lain.
002372710520
Apa bisa lokasi pengerjaan seperti sumur bor bisa dipindahkan ke tempat lain, karena warga setempat tidak mengizinkan lokasinya dibangun sarana air bersih
Senior fasilitator bersama BKM menjelaskan kepada pengadu bahwa perpindahan lokasi tersebut bisa saja dilakukan, namun diharuskan tetap berada dalam kawasan delineasi penanganan.
002662710520
Apakah Harus ada jarak antara sumber air dan septictank (1/PIM-T. Rungan/5/2020)
ada, harus lebih dari 10 meter sesuai SNI 03-2916-1992, Supaya sumber air bersih tetap terjaga hyginitas dan kebersihannya.
002882710520
[Berharap Kotaku bisa memperbaiki penutup drainase di RT 13/RW 06 karena tercium bau kurang sedap. (002882710520)];
Dijelaskan, bahwa penutup drainase di RW 13/RW 06 belum bisa diperbaiki lewat dana Kotaku karena seluruh lokasi dampingan lebih 80% pelayanan dasar tidak ada alokasi Dana BPM untuk pelaksanaan fisik kegiatan infrastruktur.
002975710520
Akibat Saluran air yang ditutup di area pembangunan skala kawasan, membuat jalur RT 2 RW 1 tergenang air (13)
Pekerjaan drainase di lokasi skala kawasan masih proses pekerjaan sehingga genangan yang ada di RT lain sulit untuk di hindari sehingga solusinya adalah segera melakukan komunikasi dengan kepala pelaksana proyek meminta di bantu agar di buat sementara saluran pembuangan air genangan ketika hujan turun.
003333260520
Rencana pelebaran beton apakah harus membuat surat ijin pakai tanah warga?
Sebagaimana ditetapkan dalam POS safeguard telah diatur tentang pemakaian lahan warga harus membuat surat ijin pakai tanah dengan format yg sudah ada dalam lampiran

003452710520
Apa yang BKM bisa berkontribusi dalam mendukung pencegahan penyebaran covid 19 diwilayahnya? (1)
Tim Fasilitator menjelaskan kepada Koordinator BKM bahwa BKM bisa berkontribusi dalam hal pencegahan penularan Covid-19 minimal membantu gugus tugas penanganan corona dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menghindari dari terjangkitnya virus yaitu dengan cara menerapkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) seperti selalu mencuci tangan, Berdian diri di rumah, jangan keluar kecuali bila ada keperluan yang sangat mendesak, dan harus pakai Masker kalau keluar rumah.
003752710520
Bagaimana kelanjutan kegiatan-kegiatan program kotaku seperti sosialisasi, coaching BKM apakah bisa dilaksanakan ditengah-tengah wabah seperti ini ? (1)
Fasilitator menyampaikan bahwa kegiatan Kotaku seperti sosialisasi maupun coaching tetap bisa dilaksanakan hanya saja teknis dan metode pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Protokol Covid-19 seperti tidak mengumpulkan banyak orang, pertemuan dilakukan paling banyak dihadiri antara 3 atau 4 orang saja.
003872710520
Bagaimana jika dalam pelaksanaan pekerjaan, ada warga yang tidak setuju lahannya dilalui oleh pekerjaan tersebut?
Sebelum pekerjaan dimulai akan dibuat perjanjian-perjanjian yang melibatkan masyarakat terdampak. Hal tersebut tertuang dalam lembaran pengelolaan lingkungan dan sosial yang bermaterai.
005082720520
[Mengapa warga sering membuang sampah di pantai yang membuat bibir pantai menjadi jorok ? (005082720520)];
Setelah ada himbuan dari Pemerintah Kelurahan, maka warga secara sadar tidak lagi membuang sampah di laut. Warga dihimbau untuk tetap membuang sampah pada tempat selayaknya karena sampah akan diangkut dan diteruskan ke Tempat Pembuangan Akhir.
005982720520
[Masih ada kebiasaan warga mengelola sampah rumah tangga dengan cara membakar. (005982720520)];
Sudah ada kesadaran warga tidak lagi mengelola sampah dengan cara membakar. Warga mulai mendistribusikan sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pihak kelurahan untuk diteruskan ke Tempat Pembuangan Akhir.